

BAB 5

KESIMPULAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian mengenai apakah Myanmar merupakan *failed states* serta pertanyaan-pertanyaan tambahan antara lain Bagaimana Myanmar sebagai sebuah negara yang gagal masih tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai sebuah negara dan bagaimana hubungan Myanmar dengan aktor-aktor lain dalam sistem internasional? Maka dari hipotesa sementara yang didapat bahwa terdapat dua sisi atau penempatan status Myanmar, yaitu Myanmar sebagai negara gagal dan Myanmar sebagai *functioning states*. Analisa dalam tesis ini didasarkan pada teori *failed states* dengan tiga pendekatan yaitu konsep atau teori mengenai negara (*state*) mengenai syarat sah serta fungsi dan tujuan negara, teori *nation building*, mengenai proses pembangunan sebuah negara dan pendekatan *failed states* atau negara gagal. Berdasarkan teori negara gagal atau *failed states* serta teori *nation building* maka dapat disimpulkan sebuah hipotesa sementara yaitu bahwa Myanmar merupakan sebuah negara yang gagal. Pemberian status gagal ini lebih kepada sikap pemerintahan Myanmar yang merupakan Junta Militer dan bukan demokrasi serta tingkat pertumbuhan ekonomi di Myanmar yang sangat rendah akibat beberapa kebijakan pemerintahannya yang dianggap terlalu merugikan rakyat Myanmar itu sendiri. Status gagal juga diberikan karena Myanmar dinilai telah melanggar hak azasi manusia dengan terlalu menekan rakyatnya sendiri, secara politik maupun sosial, oleh pemerintahan Junta militernya. Status gagal ini diberikan karena pemerintahan Myanmar dianggap tidak dapat memberikan rasa aman atau keamanan bagi warganya. Pemberian status gagal tersebut mempengaruhi dan berdampak terhadap hubungan Myanmar dengan negara lain, dan justru memberikan tindakan serta sikap dan tekanan terhadap Myanmar. Beberapa tekanan internasional itu dilakukan antara lain melalui sanksi dan embargo terhadap Myanmar. Proses *nation building* yang dilakukan oleh pemerintah Junta Militer Myanmar dapat dilihat sebagai sebuah *state making process* hal ini terlihat dari dilaksanakannya pemilu pada tahun

2010. Namun pelaksanaan pemilu ini pula tidak terlepas dari tekanan internasional agar Myanmar menerapkan sistem pemerintahan yang demokrasi.

Myanmar merupakan sebuah negara gagal karena Myanmar dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar warganya baik disektor ekonomi, politik, sosial serta keamanan, yang dapat dilihat berdasarkan *failed states indicator index*. Meskipun sebagai sebuah *failed states*, namun Myanmar masih tetap dapat menjalankan negaranya atau menjalankan fungsinya sebagai negara dan tidak runtuh seperti halnya Yugoslavia pasca Perang Dingin. Hal ini dikarenakan pemerintahan Junta Militer Myanmar yang sangat kuat, baik secara sistem maupun legitimasi yang telah berdiri sejak 1960an hingga sekarang serta kekuatan militernya. Myanmar merupakan *failed states* namun dapat tetap berjalan as *a functioning states* karena secara sistem pemerintahan Myanmar tetap dapat bekerja terlepas dari ketidak mampuan serta keengganan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Namun bila melihat kekuatan militer Myanmar yang kuat, pemerintahan yang berdaulat, meskipun dengan bentuk Junta Militer, dan kemampuannya untuk berhubungan, berinteraksi dan melakukan kerjasama dengan negara lain, yang mana merupakan sebuah dasar dari *functioning states*. Bahwa dari analisa secara internal atau domestik dapat dikatakan bahwa Myanmar sebagai sebuah negara mampu atau dapat menjalankan fungsi regulernya namun gagal dalam menjalankan fungsi *development*-nya serta fungsi dasar negara dalam memberikan kebutuhan warganya.

Jadi sebagai sebuah negara yang memiliki kedaulatan penuh atas negara dan pemerintahannya serta kekuatan militer yang sangat kuat dan hubungannya dengan negara-negara lain, maka Myanmar merupakan sebuah negara yang berfungsi utuh atau *functioning states*, namun jika melihat pada keadaan ekonomi, sosial, politik serta proses *nation/state building* yang terjadi di Myanmar maka dapat dikatakan bahwa Burma sebagai sebuah negara gagal.

Melihat pada analisa pada Bab sebelumnya dan berdasarkan tiga pendekatan yang dicoba untuk digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka ditemukan beberapa hal antara lain bahwa status Myanmar jika melihat dari sisi syarat sah sebuah negara, legitimasi serta proses *nation building*-nya, maka

Myanmar merupakan sebuah *functioning states*. Myanmar sebagai sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara yang kuat, hal ini jika dilihat berdasarkan kekuatan militer Myanmar yang sangat kuat dan besar, bahkan kedua terbesar di Asia Tenggara. Namun secara fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, khususnya di bidang ekonomi atau pembangunan serta keamanan, Myanmar dapat dikatakan sebagai negara gagal atau *failed states*.

Melihat pada interaksi serta hubungan antara Myanmar dengan negara-negara lain serta komunitas internasional, ditemukan dua hasil analisa, bahwa terdapat dua kelompok negara di mana satu kelompok tidak terpengaruh dengan status gagal yang diberikan kepada Myanmar dan tetap melakukan hubungan kerjasama dengan Myanmar, antara lain China, ASEAN, India, Pakistan, Rusia, Serbia dan Kanada. Hubungan ini berdasarkan *interest* atau kepentingan negara-negara tersebut akan sumber minyak dan gas alam di wilayah Myanmar, begitupun dengan Myanmar yang memerlukan bantuan persenjataan guna tetap mempertahankan legitimasi Junta Militer sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar. Adanya hubungan diplomatik ini menegaskan bahwa Myanmar merupakan sebuah negara yang sah dan berdaulat serta berfungsi secara penuh sebagai sebuah negara atau *functioning states*. Namun di sisi lain ada negara-negara “pro-demokrasi” seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang yang memberikan sanksi serta embargo bahkan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Myanmar memperlihatkan bahwa Myanmar sebagai sebuah negara gagal atau *failed states*.

5.1 Penutup

Pada tanggal 7 November 2010 pemerintah Junta Militer Myanmar untuk pertama kalinya dalam satu dekade menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu. Pelaksanaan pemilu ini dilihat sebagai bentuk “kerjasama” terhadap tekanan dunia internasional atas pemerintahan Junta Militer juga untuk mengurangi embargo-embargo dan sanksi yang diberikan oleh negara-negara barat. Kebijakan “kerjasama” ini juga diikuti dengan pembebasan Aung San Suu Kyi pada 13 November 2010 setelah hampir 15 tahun menjalani hukuman tahanan rumahnya. Sampai saat ini Aung San Suu Kyi

masih dianggap sebagai ancaman karena ia dapat mengumpulkan massa. Aung San Suu Kyi merupakan anak dari pahlawan kemerdekaan Myanmar jenderal Aung San. Namun sejak kecil Aung San Suu Kyi tinggal dan besar di Inggris. Hal ini yang membuat atau membentuk pola pemikirannya terhadap demokrasi barat dan dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah Junta Militer. Aung San Suu Kyi belum tentu bisa memberikan perubahan yang signifikan terhadap Myanmar karena budaya Myanmar tidak terlalu mengakar pada dirinya. Namun pelaksanaan pemilu serta pembebasan Aung San Suu Kyi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan dalam pemerintahan Junta Militer. Hal ini dilakukan hanya untuk mengurangi tekanan dunia internasional. Meski begitu pelaksanaan pemilu dapat dijadikan sebuah proses pembelajaran dan pengenalan bagi masyarakat Myanmar terhadap demokrasi sehingga proses *nation building* di Myanmar dapat berjalan dengan alamiah tanpa ada intervensi dari pihak luar dan dengan begitu diharapkan dapat membantu Myanmar keluar dari status *failed states*-nya karena dianggap sama sekali tidak demokrasi.

Tidak ada hubungan langsung antara pemberian status *failed states* dengan embargo maupun sanksi karena masing-masing merupakan bentuk kebijakan yang berbeda. Embargo atau sanksi dapat merupakan dampak atau akibat dari kegagalan suatu negara. Begitupun sebaliknya *failed states* atau kegagalan sebuah negara dapat diakibatkan oleh sanksi atau embargo.

Konsep mengenai *failed states* dan *nation building* merupakan sebuah konsep yang menarik untuk diteliti lebih jauh karena konsep *failed states* itu sendiri belum memiliki kesamaan serta definisi yang konkrit sehingga masih terdapat banyak celah yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tersendiri. Begitupun dengan konsep *nation building* di mana masih akan terus berubah mengingat tujuan dari *nation building* yang untuk mencapai sebuah negara yang lebih baik, secara fungsi, institusi dan legitimasi. Di harapkan dengan tesis ini dapat menjadi dapat membantu untuk lebih memahami konsep negara gagal beserta indikator-indikatornya, baik itu berdasarkan konsep kenegaraan maupun konsep-konsep negara, *failed states* dan *nation/state building*. Tesis ini juga di harapkan dapat melihat lebih jauh mengenai Myanmar.